SLEMAN

DIMINTA BERKEGIATAN YANG PRODUKTIF

Pjs Bupati Serahkan SK Pensiun

pati Sleman Kusno Wibowo, TMT 1 Januari sampai de-

SLEMAN (KR) - Pjs Bu- ngan 1 Juni 2025 di lingkungan Pemkab Sleman di Gedung Selasa (20/11) menyerahkan Serba Guna Kabupaten Surat Keputusan (SK) pensiun Sleman. Surat Keputusan bagi PNS calon purna tugas Pensiun ini diberikan kepada pejabat eselon II sebanyak 2

PNS, eselon III sebanyak 6 PNS, eselon IV sebanyak 9 PNS, jabatan fungsional guru 117 PNS, jabatan fungsional non guru 31 PNS, dan jabatan pelaksana ada 51 PNS.

Kusno mengucapkan terima kasih kepada calon purna tugas atas pengabdiannya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat di Pemkab Sleman. Pemberian SK pensiun ini diharapkan tidak menyurutkan pelaksanaan kewajiban dan tugas pokok sebagai ASN. Namun justru memotivasi untuk terus berprestasi di lingkungan kerja masing-masing sampai dengan memasuki masa pensiun. "Saya bermasa purna tugas ini bapak dan ibu tetap bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif," ujarnya.

Kusno menambahkan, pengabdian tidak hanya dapat dilakukan di dalam sistem pemerintahan saja, namun dalam aktivitas sosial

harap agar dalam memasuki kemasyarakatan juga merupakan bentuk pengabdian yang bernilai. Untuk itu diharapkan pengalaman calon purna tugas dapat menjadi bekal untuk berkarya di tengah masyarakat.

Sementara menurut Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

(BKPP) Kabupaten Sleman Wiyato Widodo menyebut, sebanyak 488 PNS di lingkup Pemkab Sleman memasuki batas usia pensiun pada tahun 2025. Surat Keputusan (SK) pensiun yang diserahkan Pjs Bupati Sleman Kusno Wibowo sebanyak 216 SK yang berasal dari 34 instansi.



DPRD KABUPATEN SLEMAN SUARA WAKIL RAKYAT

Jl. Parasamya, Tridadi, Sleman, DIY Kode Pos 55511. Telp.(0274)868413, Fax (0274)868413

KINERJA KOMISI A DPRD KABUPATEN SLEMAN

Upayakan Peningkatan Insentif bagi Perangkat dan BPKal



KR-Istimewa

Suharyono SPd

SLEMAN (KR) - Perangkat kalurahan dan Badan Pemusyawaratan Kalurahan (BPKal) merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Melihat beban kerjanya,

Wakil Ketua Komisi A DPRD Sleman Suharyono SPd mengatakan, tugas seorang perangkat kalurahan itu tidak hanya sebatas jam kantor saja. Namun terkadang perangkat kalurahan bekerja 24 jam dalam melayani masyarakat.

"Mereka itu jadi ujung tombak pelayanan pemerintah di tingkat paling bawah. Meskipun itu malam atau dini, kalau urusan pelayanan masyarakat tetap dilakukan oleh perangkat," kata Suharyono.

Untuk itu, pihaknya akan mengupayakan peningkatan insentif bagi perangkat kalurahan dan BPKal. Dengan harapan pelayanan kepada masyarakat lebih meningkat lagi. "Nanti akan kami upayakan supaya insentif mereka (perangkat dan BPKal) naik dari yang sekarang. Ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada mereka yang telah jadi ujung tombak pelayanan kepada masyarakat," ujar politisi dari NasDem.

Di samping itu, Komisi A nanti ju-

Kabupaten Sleman. Hal itu dikarenakan berkaitan dengan investasi di bumi Sembada ini. "Izin tidak boleh dibuat berbelit-belit. Namun harus tetap memperhatikan dengan peraturan yang ada. Ketika izin dipermudah, harapannya banyak investor masuk ke Sleman," ucap warga Seyegan ini.

Ketika banyak investor masuk, lanjut Suharyono, nantinya juga akan berdampak pada pembangunan di Sleman. Diantara Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat, dapat menyerap tenaga kerja lokal sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan lainnya. "Artinya nanti yang menikmati juga masyarakat Sleman. Ketika banyak investor, harapannya roda perekonomian akan semakin meningkat sehingga kesejahteraan masyarakat juga akan naik," terang anggota legislatif dari Dapil 6 yang meliputi Seyegan, Godean, Moyudan dan Minggir.



Suharyono saat rapat di Komisi ADPRD Kabupaten Sleman.

buran lahan pertanian. Jika memang lahan tidak subur, tidak boleh dipaksakan untuk lahan pertanian.

"Dinas itu harus melihat fakta di lapangan. Apakah kondisinya subur atau tidak. Kalau tidak, ya sebaiknya diperbolehkan untuk kegiatan ekonomi lain yang lebih menguntungkan. Tapi kalau lahan yang akan dijadikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Suharyono meminta datanya harus valid. Kemudian dirinya juga meminta supaya memprioritaskan lama pengabdian dan usia. "Kami berharap tidak berdasarkan nilai ujian saja. Tapi juga mempertimbangkan masa pengabdian dan sehingga perlu diapresiasi kinerja-



SLEMAN BARU HARAPAN BARU

KOALISI SLEMAN BARU















JANGAN LUPA COBLOS NOMOR 2